

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Determinan Permintaan Kredit Mobil Konvensional Baru atau Bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta : *A Bivariate Probit Approach* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih tinggi daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2. Pengeluaran konsumsi yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih rendah daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Harga mobil yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih tinggi daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
4. Jumlah tanggungan keluarga yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih rendah daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
5. Tingkat suku bunga yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih rendah daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih tinggi dibandingkan mobil bekas di Provinsi

Daerah Khusus Jakarta. Temuan ini dapat dijadikan landasan bagi lembaga pembiayaan dan perbankan untuk mengembangkan skema kredit kendaraan bermotor yang lebih adaptif dan responsif terhadap kapasitas finansial masyarakat, khususnya kelompok pendapatan menengah, melalui penyesuaian pada struktur tenor, besar cicilan, serta besaran uang muka. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan akses terhadap pembiayaan kendaraan dan upaya pengendalian volume kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat diimplementasikan, antara lain, melalui mekanisme pengendalian seperti sistem kuota kendaraan baru, perluasan kebijakan pembatasan kendaraan (seperti ganjil-genap), atau pemberian insentif pembiayaan yang diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang lebih rendah.

2. Pengeluaran konsumsi yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih rendah daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan dapat mengembangkan skema kredit yang lebih fleksibel seperti tenor menengah, cicilan bertahap, atau program bundling kredit untuk kendaraan tertentu yang lebih hemat bahan bakar dan berukuran kecil, sehingga tidak menambah beban lalu lintas secara signifikan. Strategi ini sebaiknya difokuskan pada segmen masyarakat yang mobilitasnya memang belum terjangkau transportasi publik secara optimal. Sementara itu, pemerintah daerah dapat bersinergi dengan lembaga pembiayaan melalui pengaturan zonasi kredit, misalnya hanya memberikan insentif pembiayaan untuk kendaraan pribadi di wilayah penyangga atau yang tidak masuk zona padat. Upaya ini memungkinkan pertumbuhan sektor pembiayaan tetap berjalan tanpa mengganggu kebijakan pengendalian kemacetan dan tata kelola transportasi perkotaan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penyesuaian strategi pembiayaan kendaraan di wilayah perkotaan.

3. Harga mobil yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih tinggi daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Preferensi masyarakat terhadap mobil baru meskipun harganya lebih tinggi menunjukkan bahwa aspek kualitas, efisiensi, dan kenyamanan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan kredit kendaraan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan untuk merancang skema kredit yang lebih selektif dan diarahkan pada jenis kendaraan yang sesuai dengan karakteristik mobilitas perkotaan. Sementara itu, pemerintah daerah dapat mendorong integrasi antara kebijakan pembiayaan kendaraan dan pengembangan transportasi publik, seperti membuat kebijakan yang mendorong insentif kredit bagi kendaraan yang digunakan sebagai sarana pendukung transportasi massal atau layanan angkutan daring, sehingga perluasan akses pembiayaan tetap sejalan dengan upaya pengendalian kemacetan dan efisiensi sistem transportasi kota.
4. Jumlah tanggungan keluarga yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih rendah daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Keluarga dengan jumlah tanggungan yang lebih banyak biasanya lebih memilih membeli mobil bekas karena keterbatasan anggaran serta prioritas dalam pengelolaan pengeluaran rumah tangga. Oleh sebab itu, penting untuk menyelenggarakan program edukasi keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam mengatur keuangan keluarga secara lebih efisien, sehingga keluarga mampu merencanakan pembelian kendaraan yang sesuai dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah perlu memperhatikan struktur keluarga sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan kebijakan pembiayaan dan subsidi kendaraan.
5. Tingkat suku bunga yang meningkat memberikan peluang permintaan kredit mobil konvensional baru yang lebih rendah daripada mobil konvensional bekas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Artinya, kenaikan suku bunga pada kredit

mobil baru cenderung mengurangi minat masyarakat untuk mengajukan kredit tersebut, sehingga banyak yang memilih mobil bekas dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah. Maka diperlukan kolaborasi antara lembaga pembiayaan, produsen kendaraan, dan otoritas terkait dalam merancang skema pembiayaan yang kompetitif namun tetap berkelanjutan. Lembaga pembiayaan dapat menawarkan program bunga tetap atau insentif kredit terbatas waktu guna menjaga minat terhadap mobil baru, tanpa menciptakan tekanan fiskal. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama otoritas moneter dapat mendukung stabilitas biaya pembiayaan melalui pengendalian inflasi dan penyediaan informasi pasar yang transparan, sehingga mendorong terciptanya ekosistem pembiayaan kendaraan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat urban.

